

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

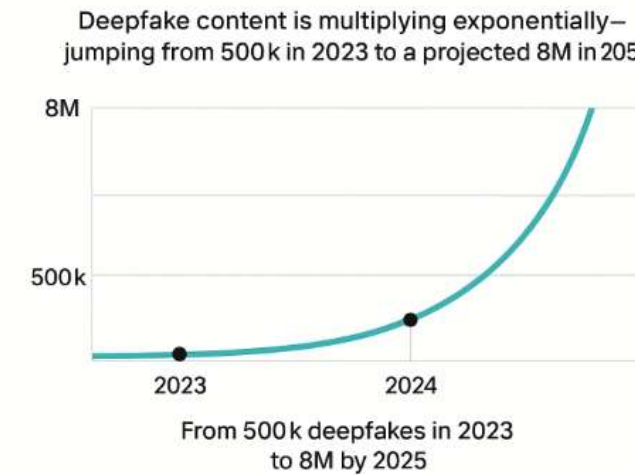
Transformasi digital telah menjadi pilar utama dalam perubahan struktur sosial dan ekonomi global, termasuk di Indonesia. Proses digitalisasi ini mencakup adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan individu serta organisasi untuk mengakses, memproduksi, dan menyebarkan informasi secara efisien (KOMDIGI, 2024). Di Indonesia, perkembangan internet terus meningkat, dengan sekitar 79% populasi telah terhubung ke dunia digital pada tahun 2024, hal ini mencerminkan adopsi teknologi yang semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat (WorldEconomicForum, 2025). Selain itu, sektor bisnis juga menunjukkan tren kenaikan dalam adopsi teknologi digital. Seperti contohnya, pasar transformasi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 19,8 miliar pada tahun 2024, didorong oleh peningkatan konektivitas internet, mobilitas digital, dan inisiatif pemerintah yang mendukung transformasi digital di berbagai sektor (Sherya, 2024), hal ini menunjukkan betapa pesatnya transformasi digital yang terjadi di dunia maupun di Indonesia belakangan ini.

Adopsi teknologi digital tidak hanya terbatas pada konektivitas internet, tetapi juga mencakup penerapan teknologi canggih di berbagai bidang seperti media, hiburan, pendidikan, dan komunikasi. Sektor-sektor ini semakin mengandalkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, *platform* pembelajaran *online* semakin populer, memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan fleksibel bagi masyarakat (DicodingIndonesia, 2026). Di sektor hiburan, layanan *digital streaming* sudah mulai pelan pelan menggantikan media tradisional. Transformasi digital ini juga menciptakan peluang baru dalam perekonomian digital, seperti *e-commerce*, *fintech*, dan layanan berbasis aplikasi, yang semakin berkembang pesat di Indonesia (Sherya, 2024).

Seiring dengan perkembangan transformasi digital ini, teknologi kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut *Artificial Intelligence* (AI) telah muncul sebagai salah satu pilar penting dalam transformasi digital. AI mencakup berbagai teknologi seperti *machine learning*, *deep learning*, dan *generative AI* yang memungkinkan pembuatan konten digital secara realistis, termasuk teks, gambar, dan suara (Stryker, 2022). Di Indonesia, adopsi AI semakin meluas, dengan sekitar 92% para pelajar kini mengintegrasikan *generative AI* dalam alur kerja mereka, jauh melampaui rata-rata global (Shereen, 2025). Selain itu, sektor bisnis juga menunjukkan tren yang meningkat dalam adopsi AI, dengan 50% karyawan di Indonesia menggunakan AI secara mingguan dalam pekerjaan mereka, dan 21% menggunakannya setiap hari (Pardiwalla et al., 2024). Penerapan AI ini mencakup berbagai bidang, seperti pembuatan konten digital, analisis data, proses bisnis, dan layanan pelanggan. Dalam industri hiburan, misalnya, AI digunakan untuk menghasilkan konten visual dan audio yang menarik, meningkatkan *attraction* dari *audience*. Di sektor bisnis, AI membantu dalam analisis data besar untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Selain itu, AI juga digunakan dalam layanan pelanggan melalui *chatbots* dan asisten virtual, memberikan respon yang cepat dan personal kepada konsumennya (Sabrina, 2024).

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa jenis jenis dari *artificial intelligence* sangat bervariasi, akan tetapi salah satu jenis dari AI yang sedang memiliki fenomena berkembang merupakan *deepfake*. *Deepfake* merupakan fenomena digital di bawah payung *artificial intelligence* yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Puspita, 2024). Istilah "*deepfake*" berasal dari gabungan kata "*deep learning*" dan "*fake*", merujuk pada teknik manipulasi media digital baik gambar, audio, maupun video yang menggunakan AI untuk menciptakan konten palsu namun tampak sangat realistis (Puspita, 2024). Teknologi ini memungkinkan pembuatan wajah palsu, suara yang meniru individu tertentu, hingga video yang menampilkan seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sejak pertama kali dikenal pada tahun 2017 melalui *platform* Reddit, *deepfake* telah berkembang pesat, seiring dengan

semakin mudahnya akses ke alat-alat AI dan meningkatnya kemampuan teknologi dalam menghasilkan konten yang meyakinkan (Payne, 2025).



Gambar 1. 1 Tren Kenaikan Penggunaan *Deepfake*

Sumber: Khalil (2025)

Fenomena *deepfake* telah berkembang pesat sejak pertama kali dikenal pada tahun 2017, seiring dengan kemajuan teknologi AI. Pada tahun 2023, diperkirakan terdapat lebih dari 500.000 video dan audio *deepfake* yang dibagikan melalui media sosial, dan jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 8 juta pada tahun 2025, mencerminkan lonjakan signifikan dalam produksi dan distribusi konten *deepfake* di seluruh dunia (Khalil, 2025). Pertumbuhan ini didorong oleh semakin mudahnya akses ke alat-alat AI dan meningkatnya kemampuan teknologi dalam menghasilkan konten yang meyakinkan. Lalu untuk Indonesia, fenomena *deepfake* juga menunjukkan tren yang sangat naik pesat. Konten *deepfake* di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 550% dalam lima tahun terakhir (Kitonga, 2025), hal ini sangat menandakan adanya perubahan signifikan dalam pembuatan dan distribusi konten *deepfake* di global maupun di negara Indonesia.

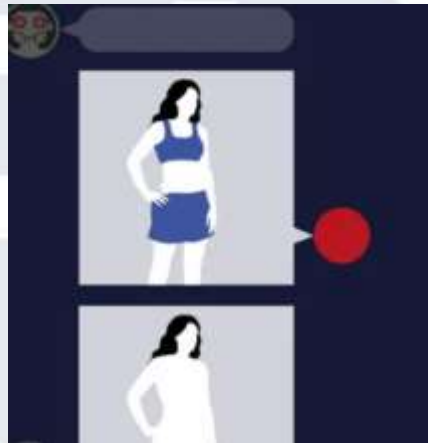
Pada awalnya, *deepfake* lebih banyak digunakan untuk hiburan atau eksperimen kreatif saja, tetapi seiring waktu, teknologi ini mulai disalahgunakan untuk manipulasi informasi yang lebih serius. Fenomena ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam penggunaan teknologi AI, yang awalnya dianggap

sebagai alat inovatif, kini berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi palsu, penipuan, hingga penyalahgunaan penggunaannya (Dhaliwal, 2025). Berdasarkan dari salah satu laporan global pada periode Februari 2023 hingga Februari 2024, sekitar 43% pengguna internet di seluruh dunia melaporkan pernah menemui konten *deepfake*, sedangkan 26% di antaranya mengaku pernah menghadapi penipuan berbasis *deepfake*, dan sekitar 9% menjadi korban langsung dari penipuan tersebut (Dhaliwal, 2025). Tidak berhenti sampai di situ, di Indonesia pertumbuhan penyalahgunaan konten *deepfake* juga kian marak. Antara tahun 2022 hingga 2023, kasus penipuan berbasis *deepfake* di Indonesia mengalami lonjakan sebesar 1.550% (Vida, 2024). Lonjakan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin rentan terhadap konten digital manipulatif.

Penyalahgunaan *deepfake* di tahun 2025 sangat bervariasi, mulai dari kepentingan politik, pembuatan berita hoaks, hingga ke ranah pribadi (Kitonga, 2025). Namun hal yang paling mengkhawatirkan adalah bentuk penyalahgunaan *deepfake* bernuansa seksual atau pornografi atau yang di sebut *deepfake porn*. *Deepfake porn* adalah konten seksual yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan, di mana wajah atau identitas seseorang dimasukkan ke dalam video atau gambar seksual yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan, sering kali tanpa persetujuan dari individu yang digambarkan (Regan, 2024). Teknologi ini biasanya mengubah materi visual asli dengan algoritma *deep learning* sehingga menghasilkan video atau gambar yang tampak realistis padahal bersifat manipulatif dan palsu. Hal ini termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (Puspitasari, 2021). Kekerasan Berbasis Gender Online atau yang di singkat KBGO, KGBO adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, dengan maksud melecehkan atau menyerang korban berdasarkan gender atau seksualitasnya (Puspitasari, 2021). KBGO bersifat virtual tetapi dapat menimbulkan dampak nyata fisik, psikologis, sosial, hingga ekonomi

Data dari *Southeast Asia Freedom of Expression Network* menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 40 kasus *deepfake porn* KBGO di Indonesia menempati posisi keempat dari jenis KBGO yang dilaporkan tahun itu naik

signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya belasan kasus (Kumparan, 2025). Kasus serupa juga muncul di tingkat global. Laporan investigasi BBC menyebutkan bahwa lebih dari 100.000 perempuan di berbagai negara menjadi korban penghapusan pakaian secara digital oleh kecerdasan buatan melalui bot Telegram (Clahane, 2020), termasuk di antaranya korban yang tampaknya masih di bawah umur. Berikut merupakan contoh dari ilustrasi teknologi tersebut:



Gambar 1.2 Ilustrasi Teknologi Deepfake di Telegram

Sumber: Clahane (2020)

Teknologi *deepfake* ini memungkinkan siapa pun mengunggah foto ke sistem untuk diolah menjadi gambar telanjang hanya dalam hitungan menit, bahkan tanpa biaya, sehingga aktivitas yang semula dipromosikan untuk “hiburan” ini justru berkembang menjadi layanan yang merugikan korban secara massal hingga lintas negara, dan cara dari foto di atas merupakan salah satu dari banyaknya cara untuk melakukan penyalahgunaan *deepfake porn* (Clahane, 2020). Lalu beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi *deepfake* untuk tujuan pornografi telah terjadi secara nyata terutama di lingkungan kampus dan hal ini sangat berdampak pada banyak korban (Hadi, 2025). Badan intelejen yang pernah mengungkap kasus ini menyatakan bahwa hanya dengan memiliki akun media sosial dengan foto terbuka untuk publik, seseorang sudah dapat dijadikan target, sehingga ancaman ini semakin dekat dengan kehidupan pengguna media sosial sehari-hari (Clahane, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi AI untuk membuat konten manipulatif yang menyerang tubuh dan citra

perempuan bukan fenomena terisolasi, melainkan pola yang memanfaatkan celah regulasi dan teknologi yang mudah diakses (Clahane, 2020).

Perkembangan di tahun 2026 juga menunjukkan bahwa pola penyalahgunaan tersebut tidak hanya terjadi melalui bot anonim di Telegram, tetapi juga melibatkan sistem kecerdasan buatan arus utama yang terintegrasi dengan *platform* media sosial besar. Salah satu contohnya adalah kontroversi yang muncul terkait fitur pengolahan gambar pada Grok, model AI yang dikembangkan oleh xAI dan terintegrasi di *platform* X, yang dilaporkan dapat memodifikasi foto perempuan menjadi konten seksual hanya melalui perintah teks sederhana seperti “*hey Grok put her on a bikini*” dan ironisnya foto dengan perintah tersebut ter *generate* dalam hitungan detik lalu terupload menjadi konsumsi publik luas (Ilham, 2026).

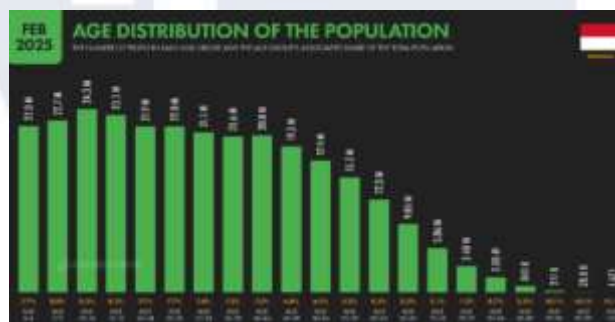


Gambar 1. 3 Prompt Comment Pengguna X

Sumber: Data Olahan Penulis (2025)

Foto di atas memperlihatkan bahwa kemampuan ini dimanfaatkan para pengguna untuk mengubah foto publik menjadi gambar sangat merugikan tanpa persetujuan korbannya, sehingga memicu kekhawatiran luas mengenai eksploitasi digital dan lemahnya pengamanan sistem terhadap penyalahgunaan (Ilham, 2026). Kasus ini memperlihatkan bahwa risiko *deepfake porn* tidak lagi terbatas pada aplikasi bawah tanah, melainkan telah memasuki ekosistem *platform* arus utama, sehingga memperluas potensi viktimisasi terhadap perempuan yang memiliki jejak digital terbuka di media sosial.

Pergeseran ini menandai munculnya dimensi baru kejahatan digital yang tidak hanya menyerang reputasi, tetapi juga integritas dan martabat korban. Fenomena semakin mudah dilakukan seiring terbukanya akses ke aplikasi, bot, maupun AI yang memungkinkan siapa saja memproduksi konten manipulatif hanya dengan mengunggah foto atau video sederhana. Kondisi ini menuntut perhatian serius karena menyorot kelompok paling aktif di ruang digital, terutama perempuan muda dan generasi Z, yang aktivitasnya di media sosial membuat mereka lebih terekspos risiko (Kumparan, 2025). Berdasarkan sebuah laporan *Digital 2025 We Are Social*, tercatat bahwa per Februari 2025 Indonesia memiliki 143 juta identitas pengguna media sosial, setara dengan sekitar 50,2 % dari total populasi (Kemp, 2025).



Gambar 1.4 Umur Pengguna Media Digital Indonesia

SumberL Kemp (2025)

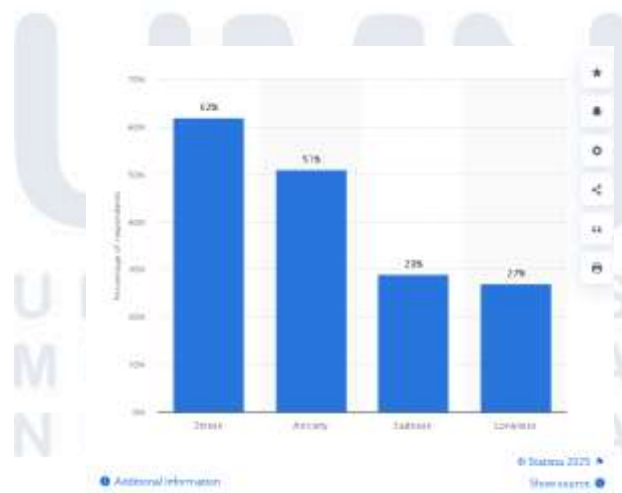
Laporan yang sama dari gambar di atas juga menunjukkan bahwa komposisi pengguna media sosial di Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda generasi-Z. Lebih mengerucut, perempuan Gen-Z ternyata juga tercatat menghabiskan rata-rata 1 hingga 6 jam per hari di berbagai *platform* digital, sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki Gen-Z yang rata-rata 1 hingga 5 jam per hari (Siahaan, 2023). Tingginya intensitas penggunaan ini menunjukkan bahwa perempuan Gen-Z tidak hanya menjadi salah satu kelompok pengguna aktif media sosial, tetapi juga berperan dalam berbagai aktivitas digital, mulai dari berinteraksi, membagikan informasi, hingga memproduksi konten. Di sisi lain, tingginya keterlibatan Generasi-Z dalam ruang digital tidak hanya menunjukkan potensi kerentanan, tetapi juga mencerminkan kapasitas mereka sebagai kelompok yang memiliki

kemampuan adaptasi tinggi terhadap perkembangan teknologi. Sebagai generasi yang tumbuh bersamaan dengan perkembangan internet dan media sosial, Generasi-Z tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen konten, pembangun komunitas digital, serta aktor yang memanfaatkan *platform* digital untuk mengekspresikan identitas dan mengembangkan peluang kreatif maupun ekonomi (Deloitte, 2023). Perkembangan fenomena *creator economy* juga menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi medium bagi Generasi-Z untuk membangun pengaruh, berbagi pengalaman, dan menciptakan nilai melalui aktivitas *online*, baik melalui produksi konten, kolaborasi dengan komunitas digital, maupun aktivitas ekonomi berbasis *platform* (IDN Media, 2024). Namun, kemampuan adaptasi dan keterlibatan aktif tersebut juga menyebabkan Generasi-Z memiliki intensitas kehadiran yang tinggi dalam ruang digital, sehingga meningkatkan kemungkinan berhadapan dengan berbagai risiko yang muncul akibat penyalahgunaan teknologi. Kombinasi intensitas waktu *online* yang tinggi dengan kebiasaan berbagi konten yang lebih terbuka dibandingkan generasi lain menjadikan perempuan Gen-Z sebagai kelompok yang lebih terekspos terhadap risiko penyalahgunaan konten manipulatif seperti *deepfake porn* (Siahaan, 2023). Temuan ini sejalan dengan catatan nasional terkait kekerasan berbasis gender, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA, 2024) mencatat peningkatan kasus KBGO yang menasar perempuan, terutama di ruang digital, seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Kemen PPPA, 2024).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang distribusi konten digital, tetapi juga berperan sebagai medium komunikasi tempat pengguna membagikan representasi diri melalui pesan visual. Foto yang diunggah ke media sosial pada umumnya dimaksudkan sebagai bentuk ekspresi diri, dokumentasi aktivitas, atau interaksi sosial. Namun, karakter media sosial yang bersifat terbuka dan mudah diakses membuat konten visual tersebut rentan untuk diambil, disalin, dan digunakan kembali di luar kendali pemiliknya. Ketika foto-foto yang awalnya dibagikan untuk tujuan komunikasi personal kemudian dimanipulasi menjadi *deepfake porn* tanpa persetujuan, media sosial tidak lagi

hanya menjadi ruang paparan isu, tetapi juga medium yang memungkinkan terjadinya viktimisasi (SafeNet, 2020). Dengan hal ini, media sosial berfungsi sebagai perantara komunikasi yang secara tidak langsung memfasilitasi terjadinya penyalahgunaan representasi tubuh dan identitas, khususnya terhadap perempuan.

Fenomena hal ini sangat bahaya, karena dampak dari hal tersebut bukan hal yang bisa di biarkan terutama bagi perempuan Gen-Z. Studi internasional menunjukkan bahwa sekitar 2,2% remaja telah menjadi korban *deepfake porn*, sementara 84% remaja menyadari potensi bahaya dari konten ini, termasuk dampak emosional, kerusakan reputasi, dan penipuan (Rebecca et al., 2024). Korban sering mengalami trauma psikologis yang serupa dengan korban pelecehan seksual, seperti kecemasan, stres, dan perasaan kehilangan kontrol atas identitas mereka (Nguyen, 2025). Tren global ini mengindikasikan bahwa perempuan Gen-Z di Indonesia, sebagai kelompok pengguna media sosial paling aktif, menghadapi risiko serupa, sehingga penelitian mengenai cara mereka melakukan *self disclosure* menjadi relevan dan penting dalam memahami dampak dari fenomena ini. Terlebih lagi Survei independen menunjukkan bahwa Gen Z sering mengalami kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. 5 Data Tingkat Kecemasan Gen Z

Sumber: Statista (2025)

Data dari Statista menemukan bahwa 62 % responden Gen Z merasa sangat tertekan atau cemas dalam sehari sebelumnya, dan hampir setengahnya juga merasakan kecemasan tinggi secara umum. Temuan ini menunjukkan bahwa pengalaman stres dan tekanan emosional merupakan hal yang umum bagi kelompok Gen-Z, sehingga mereka lebih rentan terhadap dampak psikologis dari paparan konten digital negatif, termasuk *deepfake porn*, meskipun mereka bukan korban langsung dari konten tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena *deepfake porn* tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau aspek hukum semata, tetapi juga sudah masuk ke hal yang lebih serius, khususnya ketika korban harus merespons pelanggaran privasi yang dialaminya. Setelah identitas dan tubuhnya dimanipulasi tanpa persetujuan, korban tidak hanya menghadapi dampak psikologis, kecemasan dan sosial, tetapi juga berhadapan dengan persoalan pengelolaan informasi pribadi.

Pengalaman traumatis yang dialami korban kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada kondisi emosional, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan korban dalam menghadapi dan memproses pengalaman tersebut. Menurut Adrian (2024) ketika pengalaman maupun emosi negatif terus dipendam tanpa adanya ruang untuk disampaikan, kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak negatif terhadap individu. Memendam emosi secara berkepanjangan dapat berkaitan dengan munculnya tekanan psikologis, seperti kecemasan berlebih dan perasaan tertekan, karena individu harus menghadapi beban emosional tersebut secara internal tanpa memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar (Adrian, 2024). Dalam situasi ini, tindakan membuka diri atau *self disclosure* menjadi proses yang penting. Sejumlah penelitian terdahulu di luar negeri menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual cenderung melakukan *self disclosure* secara terbatas dan selektif, umumnya kepada orang-orang terdekat seperti sahabat, pasangan, atau anggota keluarga yang dianggap aman dan dapat dipercaya (Catton et al., 2023). Pola ini menunjukkan bahwa keputusan membuka diri bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil pertimbangan yang melibatkan rasa aman, kepercayaan, serta perhitungan risiko dan manfaat (Petronio, dalam Griffin, 2012). Artinya, *self disclosure* dalam konteks pelanggaran privasi digital tidak semata-mata bertujuan

membangun kedekatan relasional, melainkan sebagai strategi untuk mencari dukungan emosional sekaligus mengelola kembali kontrol atas informasi pribadi yang telah tersebar. Dalam perspektif sebuah teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini yang dikembangkan oleh Sandra Petronio, informasi pribadi dipandang sebagai sesuatu yang dimiliki individu dan dikelola melalui aturan privasi tertentu. Dengan demikian, keputusan korban untuk membuka atau menahan informasi dapat dipahami sebagai upaya mengatur batas privasi dan mengendalikan kembali kepemilikan atas informasi yang sebelumnya telah dilanggar (Petronio, dalam Griffin, 2012).

Namun demikian, kajian mengenai *deepfake porn* hingga saat ini masih didominasi oleh pembahasan mengenai aspek hukum, keamanan digital, dan dampak psikologis secara umum. Penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana korban, terutama perempuan Gen Z, mengambil keputusan untuk membuka diri setelah mengalami pelanggaran privasi masih relatif terbatas. Padahal, cara korban mengelola *self disclosure* kepada orang terdekat merupakan hal yang sangat penting untuk di ketahui. Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan tingginya intensitas penggunaan media sosial serta meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* atau *deepfake* yang telah tercatat secara nasional. Seperti data yang sudah di paparkan, perempuan, khususnya kelompok usia muda, merupakan pengguna aktif media digital sekaligus kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan konten manipulatif berbasis kecerdasan buatan. Situasi ini menempatkan perempuan Gen Z Indonesia pada posisi yang kompleks, di mana mereka hidup dalam ekosistem digital namun sekaligus menghadapi risiko pelanggaran privasi yang semakin beresiko.

Meskipun isu *deepfake porn* semakin banyak mendapat perhatian dalam kajian komunikasi digital, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada dampak psikologis dan sosial yang dialami korban (Rousay, 2023), perilaku korban dalam mencari dukungan serta respons yang diberikan oleh komunitas digital (Wei et al., 2024), persoalan regulasi dan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* (Birrner, 2024), serta posisi media sosial sebagai ruang terjadinya Kekerasan Berbasis Gender *Online* (Arianto, 2021). Berbagai penelitian tersebut

telah memberikan pemahaman yang penting mengenai risiko, dampak, dan tantangan yang muncul akibat penyebaran *deepfake porn*. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana perempuan Generasi Z di Indonesia mengelola privasi, menentukan batas informasi pribadi, memilih orang yang dianggap aman untuk menerima informasi, serta memutuskan sejauh mana mereka melakukan self disclosure setelah menjadi korban *deepfake porn* masih relatif terbatas. Padahal, pengalaman menjadi korban tidak hanya berkaitan dengan dampak psikologis yang dirasakan, tetapi juga melibatkan proses pengelolaan informasi pribadi dan negosiasi batas privasi dalam relasi interpersonal. Oleh karena itu, keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya untuk memahami dinamika pengelolaan privasi dan proses *self disclosure* perempuan Generasi Z korban *deepfake porn* dalam konteks Indonesia, khususnya terkait pertimbangan, batasan, dan pengalaman mereka dalam mengungkapkan informasi pribadi setelah mengalami pelanggaran privasi digital.

1.2 Rumusan Masalah

Perkembangan teknologi digital dan tingginya penetrasi media sosial di Indonesia telah memperluas ruang interaksi sekaligus meningkatkan risiko penyalahgunaan konten berbasis kecerdasan buatan, termasuk *deepfake porn*. Dalam praktiknya, *deepfake porn* tidak hanya menjadi persoalan manipulasi teknologi, tetapi juga bentuk pelanggaran privasi yang secara langsung menyerang identitas dan representasi diri korban di ruang digital. Perempuan Generasi Z sebagai kelompok pengguna media sosial yang aktif berada dalam posisi yang rentan terhadap risiko tersebut.

Ketika mengalami pelanggaran privasi melalui *deepfake porn*, korban tidak hanya menghadapi dampak psikologis dan sosial, tetapi juga dihadapkan pada tantangan untuk mengelola kembali informasi pribadi yang telah tersebar tanpa persetujuan mereka. Dalam situasi tersebut, korban perlu menentukan batas-batas privasi, mengelola informasi yang dimiliki, serta mempertimbangkan kepada siapa pengalaman tersebut dapat diungkapkan dan sejauh apa. Proses ini melibatkan

berbagai pertimbangan terkait rasa aman, kepercayaan, risiko sosial, dan konsekuensi yang mungkin muncul setelah pengungkapan dilakukan.

Meskipun kasus *deepfake porn* semakin meningkat, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana perempuan Generasi Z sebagai korban mengelola privasi dan melakukan *self disclosure* setelah mengalami pelanggaran privasi masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Padahal, pemahaman mengenai pengalaman korban dalam mengelola informasi pribadi dan mengungkapkan pengalaman mereka kepada orang lain penting untuk menjelaskan bagaimana korban menghadapi, menegosiasikan, mencari rasa aman, dan membangun kembali kendali atas privasi mereka. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai pengelolaan privasi dan *self disclosure* perempuan Generasi Z korban *deepfake porn*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun pertanyaan penelitian adalah: Bagaimana proses pengungkapan diri dan pengelolaan privasi yang dilakukan oleh perempuan Generasi-Z korban *deepfake porn*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana perempuan Generasi Z korban *deepfake porn* melakukan pengungkapan diri dan pengungkapan privasi dalam konteks pengalaman mereka sebagai korban di ruang digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan informasi pribadi yang dilakukan korban, termasuk kepada siapa mereka menceritakan pengalaman tersebut, sejauh mana informasi dibagikan, serta bagaimana pertimbangan rasa aman dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini berupaya melihat tingkat kepuasan korban setelah melakukan *self disclosure*, serta dampak yang dirasakan setelah pengalaman tersebut dibagikan kepada orang lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika komunikasi interpersonal korban dalam mengelola kembali identitas dan

informasi diri setelah mengalami pelanggaran privasi akibat penyebaran konten *deepfake porn* di lingkungan digital.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap temuan yang diperoleh dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik dari segi akademis, penerapan praktis, maupun pemahaman sosial.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya mengenai pengalaman korban dalam mengelola informasi pribadi di ruang digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai proses *self disclosure* perempuan Generasi-Z korban *deepfake porn* dengan menggunakan perspektif *Communication Privacy Management*, terutama dalam melihat bagaimana individu menetapkan batas privasi, mengambil keputusan pengungkapan informasi, serta mengelola kepemilikan informasi pribadi setelah mengalami pelanggaran privasi digital. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas komunikasi interpersonal, pengelolaan privasi, dan kekerasan berbasis teknologi digital.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perempuan Generasi Z korban *deepfake porn* mengenai pentingnya pengelolaan privasi dan pertimbangan dalam melakukan *self disclosure* setelah mengalami pelanggaran privasi digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi korban dalam memahami proses pengungkapan informasi kepada orang terdekat, termasuk mempertimbangkan keamanan, dukungan, dan batasan informasi yang ingin dibagikan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi keluarga, teman, maupun pihak pendamping korban mengenai pentingnya memberikan respons yang suportif dalam proses pemulihan korban *deepfake porn*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi

masukannya bagi pihak terkait dalam mengembangkan pendekatan pendampingan yang lebih sensitif terhadap pengalaman korban kekerasan berbasis teknologi digital.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai kompleksitas pengalaman korban *deepfake porn*, khususnya dalam proses mereka mengambil keputusan untuk membuka atau menahan informasi pribadi kepada orang terdekat. Dengan memahami dinamika *self disclosure* korban, masyarakat diharapkan dapat membangun sikap yang lebih empatik dan tidak menyalahkan korban ketika mereka memilih untuk mengungkapkan ataupun menyimpan pengalaman tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih suportif bagi korban, khususnya dalam konteks komunikasi interpersonal. Dengan meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan privasi dan batas informasi pribadi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembentukan ruang sosial dan digital yang lebih aman serta responsif terhadap kebutuhan korban.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan kajian pada pengalaman perempuan Generasi-Z yang menjadi korban *deepfake porn*, khususnya dalam memahami proses pengelolaan privasi dan *self disclosure* setelah mengalami pelanggaran privasi digital. Penelitian ini berfokus pada bagaimana korban mempertimbangkan informasi pribadi yang akan diungkapkan, menentukan pihak yang dianggap aman untuk menerima informasi, serta mengelola batas privasi dalam relasi interpersonal. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pembuatan *deepfake*, identifikasi pelaku, maupun aspek hukum dan regulasi terkait penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada perspektif korban sebagai individu yang mengalami fenomena tersebut, sehingga tidak mengkaji sudut pandang pelaku maupun pihak eksternal lainnya.